

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan manusia ditentukan seberapa jauh manusia dapat memperoleh barang atau jasa dari fasilitas publik tersebut yang sebahagian besar disediakan oleh negara. Peran negara dalam hal ini kemudian diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan. Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teratur pembangunan dapat terlaksana.

Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2). Menyatakan bahwa pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa (Pendes) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat. Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus sesuai dengan pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 menjelaskan tentang pedoman pembangunan desa yang terdiri dari beberapa tahap yakni mulai dari pembentukan tim penyusun RPJMDes sampai dengan penetapan RPJMDes. Hal ini memberikan bukti bahwa dalam penyusunan RPJMDes pemerintah desa wajib untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat terutama yang terdampak langsung atas kebijakan tersebut (Widiatmoko, *et all*, 2022).

Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang istem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun baik untuk Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dokumen perencanaan pembangunan adalah dokumen yang berisi detail rencana dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembangunan suatu negara. Menurut buku "*Introduction to Development Planning*" karya William Ashcer dokumen perencanaan mencakup analisis situasi, penetapan tujuan, identifikasi kebijakan, alokasi sumber daya, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Dokumen ini menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan pelaksanaan program untuk mengarahkan upaya pembangunan dengan efektif.

Antropologi pembangunan memandang pembangunan dalam dimensi kultural sebagai “sumber daya manusia”. Dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang baik maka diperlukan membangun mentalitas manusianya terlebih dahulu. Antropologi mempelajari manusia dan segala aspeknya. Antropologi berperan memecahkan masalah manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Antropologi dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk membuat kebijakan pada suatu permasalahan pada pembangunan Indonesia dan ikut serta dalam perencanaan program pemerintah. Antropologi harus bekerja dalam seluruh tahapan proyek pemabangunan. Ada tahap yang harus dilakukan yaitu meneliti, mencari dan menentukan kebutuhan masyarakat. Memformulasikan kebijakan dan memilih alternatif solusi dan masalah yang di hadapi masyarakat. Merencanakan dan melaksanakan proyek sesuai dengan kebijakandan rencana yang telah di tetapkan. Antropologi dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk kebijakan pada suatu permasalahan pada pembangunan Indonesia dan ikut serta dalam perencanaan program pemerintah (Marzali, 2005).

Dalam buku *Antropological Praxis: Translating Knowledge Into Action*, Robert M. Wulff and Sherly J. Fiske yang diterbitkan pada tahun 1991 menyebutkan Antropologi harus bekerja dalam seluruh tahap proyek pembangunan. Pembangunan berisi suatu kompleks tindakan manusia yang cukup rumit yang melibatkan sejumlah pranata dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1980).

RPJMD ini nantinya juga menjadi rujukan utama dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berjangka waktu satu tahun. RPJMD nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Untuk mencapai harapan yang sesuai dengan keinginan masyarakat maka pentingnya melibatkan seluruh elemen masyarakat baik itu perempuan maupun anak muda yang memiliki pendidikan yang sesuai. Hal inilah yang kemudian menjadikan RPJM daerah menjadi satu hal yang sangat penting untuk diteliti. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan keterlibatan masyarakat dalam perumusan dokumen RPJMD ini. Dimana Musrenbang sebagai wadah dan kesempatan bagi masyarakat dalam memberikan dan menyalurkan aspirasi mereka.

Adanya penelitian ini penting dilakukan untuk bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJMDes dan penyusunan RKPDDes di Desa Sisumut. Juga untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sisumut dan masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sisumut periode 2015-2020 apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 atau belum. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian RPJM Desa Sisumut dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu maka peneliti menganggap penting dan tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RPJM Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka masalah utama yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen RPJMDes dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang terjadi di Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penyusunan dokumen RPJMDes dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ada di Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menggambarkan:

1. Bagaimana proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang terjadi di Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang terjadi di Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat memberikan informasi bagaimana proses perencanaan pembangunan daerah apakah sudah sesuai dengan peraturan menteri atau tidak dan sebagai gambaran kepada masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam pembagunan di Desa Sisumut. Juga memudahkan dan dapat dijadikan

perbandingan dengan penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai referensi terkait dengan penelitian-penelitian serupa.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bisa memperkaya materi Antropologi berkaitan dengan pembahasan tentang pembangunan. Dengan demikian kontribusi penelitian ini dapat dikatakan akan bisa memperkaya pembahasan tentang proses pembangunan desa di Indonesia dengan perspektif Antropologi. Disaat bersamaan penelitian ini juga akan bisa menyumbang pada proses pemanfaatan konsep budaya guna melibatkan masyarakat dalam merencanakan pembangunan sebagai sebuah proses perubahan sosial.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumbang pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah khususnya badan perencanaan dan pembangunan daerah juga aparatur desa dalam menangani masalah penyusunan perencanaan pembangunan daerah.